



KABUPATEN BALANGAN

KANTOR CAMAT BATUMANDI



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

(LKIP 2023)



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Kata Pengantar.....	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Tugas dan Fungsi.....	3
D. Struktur Organisasi.....	6
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	7
A. Rencana Strategis	7
B. Rencana Kerja.....	
C. Indikator Kinerja Utama.....	
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	8
Bab III Akuntabilitas Kinerja	10
A. Pengukuran Kinerja	10
B. Capaian Indikator Kinerja Utama	12
C. Analisis Kinerja	12
D. Realisasi Anggaran	22
E. Analisis Efisiensi	27
Bab IV Penutup	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Susunan Perangkat daerah Kecamatan	4
Tabel 1.2 Personalia Kantor Kecamatan Batumandi tahun 2023.....	4
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai, Latar Belakang, Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.....	5
Tabel 2.1 Sasaran Strategis Tahun 2023	7
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	8
Tabel 3.1 Kategorisasi Pencapaian Kinerja	11
Tabel 3.2 Capaian dan Tujuan	12
Tabel 3.3 Sasaran 1.....	13
Tabel 3.4 Sasaran 2.....	17
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja IDM.....	18
Tabel 3.6 Realisasi Belanja Kecamatan Tahun 2023.....	23
Tabel 3.7 Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	24
Tabel 3.8 Alokasi per Sasaran Pembangunan	28
Tabel 3.9 Pencapaian Kinerja dan Anggaran	30

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kecamatan Batumandi menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Batumandi yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2023.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Kecamatan Batumandi tahun 2023 dan analisisnya. Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Kecamatan Batumandi pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan pada umumnya.

Batumandi, Januari 2024

Camat



Abdul Khair, S.Pd

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690413 199804 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kecamatan Batumandi merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Batumandi menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
4. Pelaksanaan administrasi kecamatan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Kecamatan Batumandi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
2. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan;
3. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan publik;
4. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban;

5. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
6. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
7. Mengoordinasikan dan menyingkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
8. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
9. Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
10. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2023 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya.

Laporan Kinerja Kecamatan Batumandi Tahun 2023, disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Kecamatan Batumandi merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Kecamatan Batumandi, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas SKPD. Untuk tahun 2023, Kecamatan Batumandi berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Batumandi Tahun 2023 ini disusun untuk menyajikan laporan capaian indikator kinerja

dan evaluasi atas tujuan dan sasaran yang merupakan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Batumandi selama tahun 2023. Adapun penganggaran kegiatan tersusun dalam 6 (Enam) program, 12 (Dua Belas) kegiatan dan 28 (Dua Puluh Delapan) sub kegiatan.

Diharapkan dengan disusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Batumandi Tahun 2023 ini maka dapat digunakan sebagai :

- a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja;
- b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dengan kerja keras dan kerja cerdas serta dukungan dari semua pihak, semoga Kantor Kecamatan Juai dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dan dapat melaksanakan program-program secara lebih baik dan akuntabel.

CAMAT BATUMANDI



ABDUL KHAIR, S. Pd

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690413 199804 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Kecamatan Batumandi diberikan tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena adanya pelimpahan wewenang Pemerintahan, maka agar dapat berhasil dan tepat sasaran diperlukan adanya Rencana Kinerja (Renja) Batumandi sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batumandi.

Renja yang sudah dilaksanakan selama tahun 2023, kemudian pada setiap akhir tahun disempurnakan dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Dalam sebuah LKIP dapat dilihat aktivitas pengambilan keputusan tentang tingkat pencapaian kinerja yang diinginkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah termuat dalam DPA, sehingga dijadikan sebagai tolak ukur dalam komitmen bagi Kecamatan Batumandi untuk pencapaian dalam tahun 2023.

Sistem AKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, terwujudnya transparansi instansi pemerintah, terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional, dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini disebabkan dengan menerapkan Sistem AKIP tersebut setiap instansi pemerintah akan membuat Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Penetapan Kinerja (Performance Agreement) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Tahun 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Kecamatan Batumandi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2023 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

B. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggungjawab dan Pengelolaan Keuangan Negara.
4. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja.
5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73).
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3 Noreg. (3-38/2023) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023).

10. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 55).
11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 83).

C. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Batumandi dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2023. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Kecamatan Batumandi untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan Batumandi sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

D. Tugas dan Fungsi

1. Uraian Tugas Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Balangan Kecamatan mempunyai tugas – tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah d tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan atau kelurahan;

8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Unsur Perangkat Daerah

Tabel 1.1
Susunan Perangkat Daerah Kecamatan

NO.	PERANGKAT DAERAH KECAMATAN
1	Camat
2	Sekretariat
	a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3	Seksi Pemerintahan
4	Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial
5	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6	Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7	Seksi Pembangunan
8	Kelompok Jabatan Fungsional

Keadaan pegawai Kantor Kecamatan Batumandi dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Personalia Kantor Kecamatan Batumandi Tahun 2023

No	Jabatan	Jumlah
1	Camat	1
2	Sekretaris Camat	1
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1
4	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1
5	Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	1
6	Kepala Seksi Pelayanan Umum	1
7	Kepala Seksi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban	1
8	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1
9	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1
10	Pelaksana	14
11	Honorar	30
Jumlah Pegawai		53

Sumber: Sekretariat Kecamatan Batumandi, Desember 2023

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai, Latar Belakang, Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

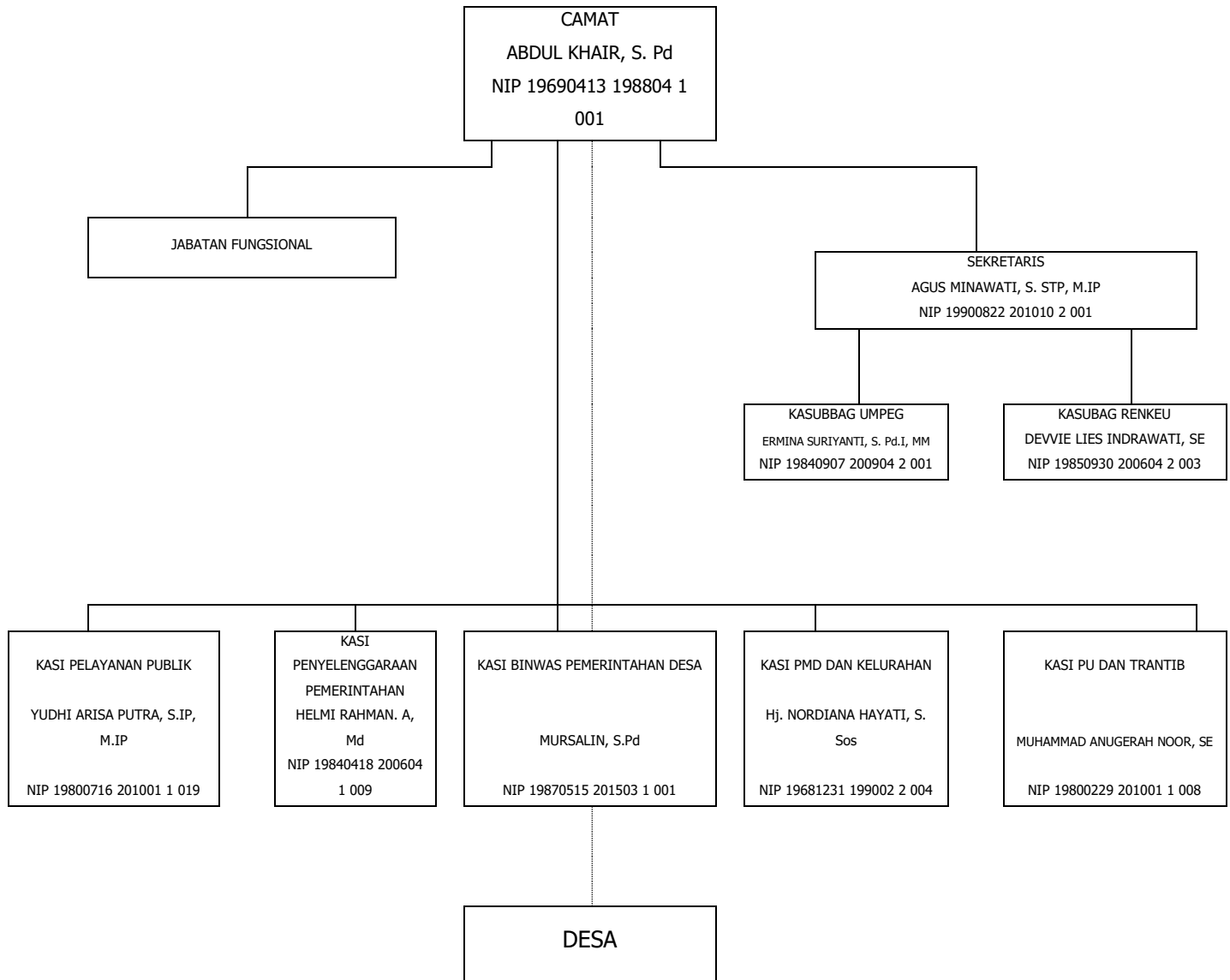
SKPD	JLH (ORG)	KUALIFI KASI PENDIDIKAN	JLH (ORG)	PANGKAT	JLH (ORG)	GOL.	JLH (ORG)
KECAMATAN BATUMANDI	23	SD	1	I/a	0	I	1
		SLTP	0	I/b	0	II	5
		SLTA	7	I/c	0	III	16
		D1	0	I/d	1	IV	1
		D2	0	II/a	0		
		D3	2	II/b	0		
		D4	0	II/c	1		
		S1	10	II/d	4		
		S2	3	III/a	3		
		S3	-	III/b	3		
				III/c	3		
				III/d	7		
				IV/a	0		
				IV/b	1		
				IV/c	-		
				IV/d	-		
				IV/e	-		

Sumber : Sekretariat Kecamatan Batumandi, Desember 2023

E. Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BATUMANDI



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Kecamatan Batumandi tahun 2023 mengacu pada Rencana Strategis (Penstra) Kecamatan Batumandi Tahun 2021-2026 dan menjawab Perjanjian Kinerja Kecamatan Batumandi Tahun 2023.

A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Berikut ini merupakan tabel gambaran Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026, bisa dilihat target dari setiap indikator dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Tabel 2.1

Sasaran Strategis Kecamatan Batumandi Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator	Target					
			2021	2023	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Baik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,5	87,5	88	88,5	89	89,5

Untuk mencapai Tujuan Strategis tersebut, maka ditentukan Sasaran Strategis Kecamatan Batumandi, yaitu :

1. Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat dengan Indikator Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, dengan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif.
3. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan, dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani.
4. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan dan Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan.

Di bawah ini disajikan Tabel Tujuan dan Sasaran Strategis berikut Indikator dan Targetnya.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target

Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Yang Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					88	88,5	89	89,5
		Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	87	87,5	88	88,5	89	89,5
		Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	90	90	90	90	90	90
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

B. Rencana Kerja

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batumandi Tahun 2023 terdiri dari 6 (enam) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batumandi Tahun 2023

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi	
			KINERJA	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	60.48 Nilai	5.113.410.573
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	4 Dokumen	10.562.500
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	4 Dokumen	10.562.500
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi keuangan yang	100%	3.773.725.123
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang dilaksanakan	14 Bulan	3.332.300.923
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	12 Bulan	428.190.500
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	4 Dokumen	13.233.700
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100%	112.745.000
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya pemenuhan jumlah pakaian pakaian/kain	50 stel	38.345.000
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	1 kali	74.400.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perkantoran	100%	457.580.000
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	11.415.400
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	2 Buah	55.446.100
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK dan Makan Minum Rapat	12 bulan	90.334.600
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Bulan	39.368.900
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150 Orang/Perjalanan	261.015.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	175.516.300
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	135.800.000
13	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Bulan	39.716.300
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang	100%	583.281.650
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	12 Bulan	275.448.400
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 Unit	65.713.100
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah waktu pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	12 Bulan	242.120.150

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN); Persentase desa yang ikut dalam lomba desa dan jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	12 bulan	20.919.700
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat yang ditargetkan terhadap Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	100%	20.919.700
17	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat yang ditargetkan terhadap Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	12 Bulan	20.919.700
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan keagamaan untuk meningkatkan cinta tanah air serta keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang maha esa	12 bulan	118.704.200
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	18 desa	34.604.200
18	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah dokumen sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat	1 Dokumen	18.604.200
19	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan	12 Bulan	16.000.000
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100%	84.100.000
20	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1 keluarga	84.100.000
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pelayanan administrasi kependudukan kecamatan	2 Kegiatan	11.584.800
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	11.584.800
21	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	11.584.800

5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan desa	100%	332.019.500
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	100%	332.019.500
22	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase pelaksanaan pembinaan wawasan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100%	188.019.500
23	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi	Jumlah Kegiatan Kemasyarakatan yang dilaksanakan	6 kegiatan	144.000.000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa	100%	118.049.200
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa	100%	118.049.200
24	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	1 Dokumen	25.805.600
25	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	18 desa	18.301.400
26	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	1 Dokumen	8.298.000
27	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan	2 kegiatan	17.244.200
28	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas	1 dokumen	48.400.000
TOTAL ANGGARAN				5.714.687.973

C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Batumandi setelah dilakukannya Penyusunan Pohon Kinerja dan Cascading terbaru, yang juga merupakan Indikator Kinerja dari Tujuan Strategis. Serta Indikator Kinerja (IK) dari Sasaran Strategis Kecamatan Batumandi Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Kecamatan
Batumandi Tahun 2023

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Makna Indikator : Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan yang diberikan Kecamatan Batumandi</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai Indikator bagi Kecamatan Batumandi terhadap pelayanan yang diberikan</p> <p>Formulasi Perhitungan : Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) seluruh Seksi</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>	Kepala SKPD (Camat)	Seluruh Seksi
2	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	<p>Makna Indikator : Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa</p>	Kepala SKPD (Camat)	Pemerintah Desa

			<p>Alasan Pemilihan : Sebagai sarana bagi Kecamatan Batumandi dalam meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri</p>		
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	<p>Makna Indikator : Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai Indikator bagi Kecamatan Batumandi dalam menjaga Kondusifitas Wilayah</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tertangani dibagi Jumlah Kasus yang Terjadi dikali 100%</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri</p>	Kepala SKPD (Camat)	Seksi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Trantib
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	<p>Makna Indikator : Tingkat Tertib Administrasi Pemerintahan</p>	Kepala SKPD (Camat)	Pemerintahan Desa

			<p>Alasan Pemilihan : Sebagai Indikator bagi Kecamatan Batumandi dalam memberikan Pembinaan Administrasi Pemerintahan</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah LPPD dan Laporan Kinerja BPD yang Disampaikan seluruh Desa dibagi 2 Laporan Per Desa dikali 100%</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri</p>		
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan	<p>Makna Indikator : Tingkat Tertib Pengelolaan Keuangan</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai Indikator bagi Kecamatan Batumandi dalam memberikan Pembinaan Pengelolaan Keuangan</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan seluruh Desa dibagi 7 Laporan Per Desa dikali 100%</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri</p>	Kepala SKPD (Camat)	Pemerintah Desa

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, maka Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja (PK) Kepala SKPD Tahun 2023

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
01	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88
02	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	90
03	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	100%
04	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	100%
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Batumandi merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2023. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran, keluaran dari masing-masing kegiatan, serta hasil (outcome) yang dicapai.

Laporan capaian kinerja tahun 2023 ini menyajikan pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi yang meliputi sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Perjanjian indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode capaian kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Terhadap terjadinya celah kinerja (performance gap), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kecamatan Batumandi menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori sebagai berikut :

Tabel 3.1
Kategorisasi Pencapaian Kinerja Berdasarkan Capaian Rata – rata atas Indikator Kinerja

Urutan	Rentang Capaian Kinerja	Katagori Capaian Kinerja
I	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
II	76 % ≤ 90 %	Tinggi
III	66 % ≤ 75 %	Sedang
IV	51 % ≤ 65 %	Rendah
V	≤ 50 %	Sangat Rendah

Dasar Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tujuan Kecamatan Batumandi yang tertera pada Renstra Penyesuaian Kecamatan Batumandi Tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Tata Pemerintahan Kecamatan Yang Baik” memiliki indikator Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM). Keberhasilan pencapaian tujuan pada tahun 2023 diukur dengan indikator, target, realisasi, persentase capaian dan kategori pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Kinerja 2023			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)
			Target	Realisasi	Capaian						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	88	88,22	100,25%	89,5	98,57%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	74,58%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian atas indikator tujuan Nilai IKM adalah melebihi 100 % atau dengan kategori sangat tinggi. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023, adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester II. Karena pada Semester II tersebut, Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan oleh seluruh seksi, hal ini sebagai konsekuensi diterapkannya Pohon Kinerja dan Cascading Terbaru pada Anggaran Perubahan. Sehingga Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimaksud adalah Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) seluruh seksi pada Kecamatan Batumandi.

Serapan Anggaran dalam rangka mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas adalah sebesar 74,58%. Yang diperoleh dari Realisasi Anggaran sebesar Rp. 15.601.600,- dengan Pagu Anggaran Rp. 20.919.700,-.

Tabel 3.3

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Kinerja 2023			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)
			Target	Realisasi	Capaian						
2	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	-	90	90	100,00%	90	100,00%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	98,72%

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif pada Tahun 2023 adalah sebanyak 90 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Dari target sebanyak 90 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), atau dengan Rasio Capaian Kinerjanya adalah sebesar 100%

Serapan Anggaran untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas adalah sebesar 98,72%, yang diperoleh dari Realisasi Anggaran sebesar Rp. 117.186.000,- dengan Pagu Anggaran Rp. 118.704.200,-.

Tabel 3.4**Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani**

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Kinerja 2023			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)
			Target	Realisasi	Capaian						
3	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	-	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	100%

Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani pada Tahun 2023 adalah sebesar 100%. Dengan Rasio Capaian Kinerja sebesar 100%, yang diperoleh dari realisasi sebesar 100%, dengan target sebesar 100%. Adapun faktor yang menyebabkan Rasio Capaian bisa maksimal, adalah :

1. Sudah selarasnya antara Sub Kegiatan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), walaupun dari sisi Belanja belum mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dimaksud.
2. Harmonisnya jalinan hubungan Forum Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), sehingga setiap ada kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Forum Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) selalu sinergis dalam melakukan penanganan.

Serapan Anggaran untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas adalah sebesar 100%, yang diperoleh dari Realisasi Anggaran sebesar Rp. 11.584.800,- dengan Pagu Anggaran Rp. 11.584.800,-.

Tabel 3.5**Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan**

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Kinerja 2023			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)
			Target	Realisasi	Capaian						
4	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	-	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	98,73%

Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan pada Tahun 2023 adalah sebesar 100%. Dengan Rasio Capaian Kinerja sebesar 100%, yang diperoleh dari realisasi sebesar 100%, dengan target sebesar 100%. Adapun faktor yang menyebabkan maksimalnya pencapaian Target Kinerja adalah, Pemerintahan Desa sudah terbiasa menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini disebabkan kedua laporan tersebut sudah dijadikan syarat untuk penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) Tahap II.

Adapun Serapan Anggarannya adalah sebesar 98,73%, yang diperoleh dari Realisasi Anggaran sebesar Rp. 327.816.200,- dengan Pagu Anggaran Rp. 332.019.500,-.

Tabel 3.6
Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Kinerja 2023			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)
			Target	Realisasi	Capaian						
4	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan	-	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	96,18%

Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan Tahun 2023 adalah sebesar 100%. Dengan Rasio Capaian Kinerja sebesar 100%, yang diperoleh dari realisasi sebesar 100%, dengan target sebesar 100%. Adapun faktor yang menyebabkan maksimalnya pencapaian Target Kinerja adalah, Laporan Keuangan Desa baik Triwulan, Semester maupun Tahunan, sudah tersedia pada Aplikasi Siskeudes, yang merupakan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Adapun Serapan Anggarannya adalah sebesar 96,18%, yang diperoleh dari Realisasi Anggaran sebesar Rp. 151.450.000,- dengan Pagu Anggaran Rp. 113.545.000,-.

B. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan pada tahun 2023 berjumlah Rp. 5.714.687.973,- yang meliputi Belanja Tidak Langsung berjumlah Rp. 3.332.300.923,- dan Belanja Langsung Berjumlah Rp. 2.382.387.050,-.

Anggaran yang berhasil direalisasikan sebesar Rp. 5.359.651.561,- atau sekitar 95,76%.

1. Belanja Tidak Langsung T.A 2023

APBD Murni Rp. 3.398.656.573,-

APBD Perubahan Rp. 3.332.300.923,-

Telah Terealisasi sebesar Rp. 3.182.540.486,- sebesar 95,51% dari Total Belanja Tidak Langsung.

2. Belanja Langsung T.A 2023

APBD Murni Rp 1.740.731.400,-

APBD perubahan Rp 2.382.387.050,-

Telah Terealisasi sebesar Rp. 2.290.071.075,- atau sebesar 96,13% dari Total Belanja Langsung

Total = Belanja langsung (Rp 2.290.071.075,-) + Belanja Tidak Langsung (Rp. 3.332.300.923,-) = Rp 5.714.687.973,- (Belanja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang)

Telah terealisasi sebesar Rp. 5.472.611.561,- atau sebesar 95,76% dari total belanja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang).

Berikut rincian alokasi dan realisasi dana untuk masing masing kegiatan:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD

Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD adalah senilai Rp. 10.562.500,- yang semuanya dialokasikan untuk

belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2023 sebesar Rp. 10.552.500,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,91%.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah senilai Rp.3.332.300.923,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja pegawai. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2023 sebesar Rp. 3.182.540.486,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 95,51%.

2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD adalah senilai Rp. 429.190.500,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2023 sebesar Rp. 403.242.120,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 94,17%.

3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD

Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD senilai Rp. 13.233.700,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2023 sebesar Rp. 13.213.700,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,85%.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya adalah senilai Rp.

38.345.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2023 sebesar Rp. 38.345.000,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 100%.

- 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan adalah senilai Rp. 74.400.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2023 sebesar Rp. 59.400.000,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 79,84%.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor adalah senilai Rp. 11.415.400,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2023 sebesar Rp. 11.406.600,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,92%.
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah senilai Rp. 55.446.100,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja modal. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2023 sebesar Rp. 52.799.300,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 95,23%.
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah senilai Rp. 90.334.600,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2023 sebesar Rp. 90.304.300,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,97%.

4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan adalah senilai Rp. 39.368.900,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2023 sebesar Rp. 39.308.600,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,85%.

5) Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah senilai Rp. 261.015.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2023 sebesar Rp. 260.731.826,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,89%.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah senilai Rp. 135.800.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2023 sebesar Rp. 116.375.429,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 85,70%.

2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah senilai Rp. 39.716.300,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2023 sebesar Rp.39.712.700,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,99%.

f. Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah senilai Rp. 275.448.400,- yang dialokasikan untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp. 108.448.400,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.167.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2023 sebesar Rp. 262.976.500,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 95,47%.

2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah senilai Rp. 65.713.100,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2023 sebesar Rp.65.083.100,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,04%.

3) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah senilai Rp. 242.120.150,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2023 sebesar Rp.240.885.800,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,49%.

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan adalah senilai Rp. 20.919.700,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2023 sebesar Rp. 15.601.900,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 74,58%.

C. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- 1) Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan.

Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan adalah sebesar Rp. 18.604.200,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2023 sebesar Rp. 17.700.000,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 95,14%.

- 2) Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah senilai Rp. 16.000.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2023 sebesar Rp. 15.970.000,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,81%.

b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

- 1) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas adalah sebesar Rp. 84.100.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2023 sebesar Rp. 83.515.000,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,31%.

D. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan adalah senilai Rp. 11.584.800,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2023 sebesar Rp. 11.584.800,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 100%.

E. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah senilai Rp. 188.019.500,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2023 sebesar Rp. 185.687.000,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 98,76%.

- 2) Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal adalah senilai Rp. 144.000.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2023 sebesar Rp. 142.129.200,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 98,70%.

F. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa adalah senilai Rp. 25.805.600,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2023 sebesar Rp. 25.770.000,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,86%.

2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa adalah senilai Rp. 18.301.400,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2023 sebesar Rp. 17.980.000,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 98,24%.

3) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa adalah senilai Rp 8.298.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2023 sebesar Rp. 6.060.000,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 73,03%.

- 4) **Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Parsipatif**
Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Parsipatif adalah senilai Rp. 17.244.200,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2021 sebesar Rp. 15.950.000,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 92,49%.
- 5) **Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa**
Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah senilai Rp. 48.400.000,- yang semua dialokasikan untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp. 15.400.000,- dan untuk belanja modal sebesar Rp. 33.000.000. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2023 sebesar Rp. 47.785.000,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 98,37 %.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Kecamatan Batumandi telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 4 (empat) sasaran dan 4 (empat) indikator tersebut, Keempat sasaran kecamatan Batumandi dinyatakan dalam kategorisasi sangat tinggi karena capaiannya memenuhi target.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN

- a. Memberikan pelayanan yang baik dan prima kepada masyarakat yang datang untuk mengurus bermacam keperluan administrasi sehingga dari hasil survey yang di berikan kepada responden yang datang tersebut, hasil dari IKM menunjukkan hasil yang sangat baik dan telah berhasil melampaui target yang telah di tetapkan.
- b. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada walaupun dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada tidak mengurangi memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

PERMASALAHAN/HAMBATAN

Adapun hambatan atau permasalahan yang dihadapi kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) adalah sebagai berikut :

- a. Peran PATEN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat semakin berkurang. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ruang lingkup PATEN meliputi pelayanan bidang perizinan dan non perizinan. PATEN bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kenyataan saat ini ada beberapa pelayanan yang sudah tidak melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan lagi diantaranya :
 - 1) Legalisasi Domisili Penduduk;
 - 2) Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu;
 - 3) Legalisasi Surat Keterangan Pindah Datang antar Kabupaten;
 - 4) Legalisasi Surat Keterangan Pindah antar Kabupaten/Provinsi;
 - 5) Legalisasi Surat Keterangan Pindah Penduduk antar Kecamatan dalam Provinsi.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- c. Motivasi kerja dan pengembangan potensi SDM aparatur yang belum optimal. Kualitas pelayanan berhubungan erat dengan kualitas SDM aparturnya. Pelayanan yang baik perlu didukung oleh SDM yang berkualitas, karena semakin baik SDM yang dimiliki organisasi maka semakin baik pula pelayanan yang diberikan. Motivasi kerja dan pengembangan potensi SDM aparatur terkait dengan budaya pelayanan prima, etika komunikasi dalam memberikan pelayanan sangat dirasa perlu dalam peningkatan kualitas pelayanan di Kecamatan Batumandi. Apalagi dalam kondisi sekarang ini pemetaan jabatan yang dilakukan melalui Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Peta Jabatan ASN di Lingkungan Pemerintah Kab. Balangan menyebabkan banyaknya jabatan ASN yang tidak terisi karena mempersyaratkan pendidikan.

Solusi/Strategi Pemecahan Masalah

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM serta sarana dan prasarana penunjang pelayanan.
2. Dapat terpenuhinya semua pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan selama Tahun Anggaran 2023 sehingga sesuai dengan rancangan yang ada pada renja dan renstra kecamatan.

C. Kinerja Lainnya

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan

- a. Adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara pihak kecamatan, dengan diadakannya rapat internal tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang diberikan sebagai catatan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Batumandi pada tahun sebelumnya.
- b. Menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik juga dengan tenaga pendamping desa dan pemerintah desa sehingga memudahkan dalam berbagai kegiatan salah satunya adalah kegiatan pendataan untuk memperoleh nilai Indeks Desa Membangun (IDM) di 18 (delapan belas) desa se Kecamatan Batumandi. Bahwasanya Pemutakhiran Data IDM juga berbasis SDGs Desa. Pemutakhiran data berbasis SDGs Desa adalah pemutakhiran data IDM yang lebih detail lagi, lebih mikro, sehingga bisa memberikan informasi lebih banyak. Sehingga jika dibandingkan dengan tahun 2022 hanya ada 1 desa bersatus maju dan sisanya 17 desa dengan status berkembang sedangkan pada tahun 2023 ini menjadi 7 desa berstatus maju dan 11 desa dengan status berkembang.
- c. Adanya inovasi dari Kecamatan Batumandi yang bernama "PAK KEDES" atau Pelayanan Aksi Kecamatan ke Desa yang melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan berupa pelayanan KIA (Kartu Identitas Anak), KTP, KK dan Akta Kematian untuk mendukung program pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara khusus. Inovasi ini bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mempercepat pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan secara antar jemput. Selain itu ada juga beberapa inovasi yang sedang dalam tahap percobaan dan sudah dijalankan yakni SIAP-e untuk aplikasi disposisi surat masuk dan aplikasi verel SPJ yang merupakan aplikasi verifikasi SPJ secara online.
- d. Memaksimalkan segala sarana prasarana yang ada untuk melakukan percepatan pendataan di desa-desa serta di dukung dengan respon yang baik dari pemerintah desa.

Permasalahan/Hambatan

- a. Keterbatasan SDM baik dari unsur kecamatan yang maupun tenaga ahli pendamping desa sehingga membuat pendataan berjalan lambat sedangkan data yang dimasukkan cukup banyak. Sampai saat ini ada beberapa desa di lingkup Kecamatan Batumandi yang tidak memiliki pedamping lokal desa yaitu Desa Lokbatu, Gunung Manau, Tariwin, Hamparaya, Teluk Masjid dan Timbun Tulang.
- b. Keterbatasan anggaran yang memungkinkan kegiatan dijalankan secara tidak maksimal seperti pembinaan dan pengawasan.

Rincian realisasi kinerja dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja pada sasaran kedua sebagai berikut :

1) Indeks Kepuasan Masyarakat

Perolehan hasil tersebut diperoleh dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial kepada 150 responden yang membutuhkan pelayanan pada Kecamatan Batumandi.

Berdasarkan hasil isian kuisisioner tersebut, formula perhitungan :

Formula Perhitungan

$$\frac{\text{Total Nilai IKM yang dicapai}}{\text{Target IKM}} \times 100\%$$

Hasil formula perhitungan diatas menunjukkan realisasi yang didapat sebesar 88,22 berdasarkan target kinerja tahun 2023 sebesar 88,22 didapat persentase capaiannya sebesar 100,25%.

2) Program Operasional Kecamatan

Capaian program ini didukung oleh capaian kinerja Esselon IV yaitu Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial dengan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

Selain itu dikarenakan pada Semester II Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan oleh seluruh seksi, hal ini merupakan konsekuensi diterapkannya Pohon Kinerja dan Cascading Terbaru pada Anggaran Perubahan 2023. Sehingga

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimaksud adalah Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) seluruh seksi pada Kecamatan Batumandi.

- c. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam Upaya memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat.
- e. Motivasi kerja dan pengembangan potensi SDM aparatur yang belum optimal. Kualitas pelayanan berhubungan erat dengan kualitas SDM aparturnya. Pelayanan yang baik perlu didukung oleh SDM yang berkualitas, karena semakin baik SDM yang dimiliki organisasi maka semakin baik pula pelayanan yang diberikan. Motivasi kerja dan pengembangan potensi SDM aparatur terkait dengan budaya pelayanan prima, etika komunikasi dalam memberikan pelayanan sangat dirasa perlu dalam peningkatan kualitas pelayanan di Kecamatan Batumandi. Apalagi dalam kondisi sekarang ini pemetaan jabatan yang dilakukan melalui Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Peta Jabatan ASN di Lingkungan Pemerintah Kab. Balangan menyebabkan banyaknya jabatan ASN yang tidak terisi karena mempersyaratkan pendidikan yang berkesuaian.

Solusi/Strategi Pemecahan Masalah

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM serta sarana dan prasarana penunjang pelayanan.
2. Dapat terpenuhinya semua pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan selama Tahun Anggaran 2023 sehingga sesuai dengan rancangan yang ada pada renja dan renstra kecamatan.

BAB IV

PENUTUP

Secara keseluruhan Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja tahun 2023 Kecamatan Batumandi telah dicapai yaitu dari 4 (empat) indikator sasaran kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi. Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Kecamatan Batumandi antara lain karena adanya wujud keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta komitmen bersama semua pihak yang ada di Kecamatan Batumandi sesuai dengan visi, misi dan prioritas pembangunan Kabupaten Balangan.

Selain itu, keberhasilan merealisasikan target kinerja juga merupakan wujud dari kepercayaan pemangku kepentingan dan masyarakat kepada Kecamatan Batumandi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Pada tahun 2023 Kecamatan Batumandi tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Menyempurnakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas program, dengan melakukan inovasi terhadap jenis-jenis program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah termuat dalam Renstra Kecamatan Batumandi yang berkualitas disesuaikan dengan kebutuhan akan peningkatan kompetensi dan pelayanan;
2. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisasi SDM di Lingkungan Kecamatan Batumandi;
3. Secara konsisten dan berkelanjutan melakukan perbaikan atau penyempurnaan Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat;
4. Meningkatkan prosedur pelayanan kepada masyarakat lebih jelas dan transparan; dan
5. Meningkatkan aktivitas pengendalian dan melakukan pengawasan serta monitoring secara terus menerus terhadap semua kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Batumandi ini disusun sebagai bentuk Pertanggungjawaban atas apa yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2023. Semoga apa yang tersaji dapat memberikan masukan untuk Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan Batumandi di tahun-tahun yang akan datang.



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN KECAMATAN BATUMANDI

JLN JENDERAL AHMAD YANI No. 10 RT. 04 DESA BATUMANDI
KABUPATEN BALANGAN KODE POS 71663

SURAT PENYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL KHAIR, S. Pd
NIP : 19690413 198804 1 001
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I / IV B
Jabatan : Camat Batumandi

Dengan ini menyatakan bahwa, penyebab perbedaan IV Kinerja Utama dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Perubahan 2023 dengan apa yang disampaikan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, adalah :

1. Terjadi kesalahpahaman antara Pemerintah Kecamatan dengan narasumber pada saat Pra Evaluasi RB dan SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, terkait pemilahan Indikator Kinerja bagi Kepala SKPD dan Kepala Seksi.
2. Tidak memungkinnya lagi waktu, untuk melakukan perbaikan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2023 Kepala SKPD.

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk diketahui dan sebagai bahan berikutnya.

Camat,



ABDUL KHAIR, S. Pd
NIP 19690413 198804 1 001